



2021



Rumah Sakit Jiwa Prof. HB . SAANIN PADANG

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2021 sesuai dengan apa yang diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan media hubungan kerja organisasi, serta sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat selaku pemberi wewenang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan juga berfungsi sebagai alat/sasaran untuk perbaikan Manajemen dan Organisasi dimasa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 disusun berdasarkan evaluasi dan analisis hasil capaian kinerja dalam upaya mewujudkan manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabilitas. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja yang telah dicapai dari masing-masing unit kerja dilingkungan Rumah Sakit Jiwa.

Selanjutnya kepada semua pihak unit kerja dilingkungan Rumah Sakit Jiwa yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini diucapkan terima kasih. Namun demikian diharapkan kepada semua pihak walaupun telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, mungkin dalam menyusun buku ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan.

Padang, Januari 2022



dr. Aklima MPH

NIP. 19680203 200212 2 002

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang (LAKIP) Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2021.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2016–2021. Yaitu **Visi** tersebut adalah: “Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa di Indonesia”.Sesuai dengan visi tersebut, maka **Misi** RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah *Memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan Meningkatkan kemandirian rumah sakit. Motto* adalah *Mengutamakan pelayanan yang Ramah, Cepat, Tepat dan Terbaik*

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Kesehatan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah secara umum tujuan dan sasaran Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk jangka menengah adalah sbb :

a. Tujuan:

1. Menurunnya Angka Kematian
2. Terwujudnya Rumah Sakit yang Mandiri

b. Sasaran:

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Prima
2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima
3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
4. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LAKIP 2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Program Kinerja dan Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat telah berjalan sesuai program yang telah direncanakan dengan pencapaian tujuan dan sasaran utama, sebagaimana digambarkan pada tabel 0.1 Capaian Kinerja Program dan tabel 0.2 Capaian Indikator Kinerja Utama sbb:

Tabel. 0.1		Kinerja Program Tahun 2021			
NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	90,18	100,2
		AvLos	30 Hari	24,28 hari	119
		Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis	90%	98,91	109
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	48%	53,79	112
		Nilai Evakuasi SAKIP OPD	Nilai BB (79%)	79,22	100,2

Tabel. 0.1.1		Laporan Realisasi Kegiatan APBD Tahun 2021						
NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Anggaran	Sumber Dana
			Rp	Keuangan	Fisik (%)	Keu %		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44,582,698,384		41,537,132,538	100	93.17%	3,045,565,846	
A	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	21,355,543,017		20,942,933,539	100	98.07%	412,609,478	DAU
B	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	23,227,155,367		20,594,198,999	100	88.66%	2,632,956,368	BLUD
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,433,404,974	3,405,925,565	2,912,417,729	99	84.83%	520,987,245	
A	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	1,125,361,000	2,240,973,315	1,076,021,065	98	95.62%	49,339,935	
1	BELANJA BARANG DAN JASA	18,753,409	11,190,850	11,190,850	88	59.67%	7,562,559	
	Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18,753,409	11,190,850	11,190,850	87.50	59.67%	7,562,559	DAK dan DBHCHT
2	BELANJA MODAL	1,106,607,591	2,229,782,465	1,064,830,215	100	96.2	41,777,376	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	660,343,258	644,115,206	644,115,206	100	97.54%	16,228,052	DAK
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	15,814,200	15,802,009	15,802,009	100	99.92%	12,191	DAK
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	21,455,133	18,610,000	18,610,000	100	86.74%	2,845,133	DAK
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4,155,000	2,432,100	2,432,100	100	58.53%	1,722,900	DAK
	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	9,800,000	5,390,000	5,390,000	100	55%	4,410,000	DAK
	Belanja Modal Alat Kesehatan Perawatan	395,040,000	378,480,900	378,480,900	100	95.81	16,559,100	DBHCHT

B	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1,300,000,000	1,164,952,250	1,164,952,250	100	89.61%	135,047,750	
	BELANJA MODAL	1,300,000,000	1,164,952,250	1,164,952,250	100	89.61%	135,047,750	
	Belanja Modal Electric Generating Set	1,300,000,000	1,164,952,250	1,164,952,250	100	89.61%	135,047,750	
	Generator Set	1,300,000,000	1,164,952,250	1,164,952,250	100	89.61%	135,047,750	DAK
C	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,008,043,974		671,444,414	100	66.61%	336,599,560	
	Jasa Tenaga Kesehatan	443,043,974		412,902,200	100	93.20%	30,141,774	DID
	Jasa Tenaga Pelayanan Tindak Siaga Medik (DR. Spesialis Jiwa)	280,000,000		250,000,000	100	89.29%	30,000,000	DID
	Jasa Tenaga Pelayanan Tindak Siaga Medik (DR. Spesialis Jiwa)	160,000,000		160,000,000	100	100.00%	-	DID
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,043,974		2,902,200	100	95.34%	141,774	DAU
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	565,000,000		258,542,214	100	45.76%	306,457,786	DAU
	Nakes Covid-19	487,500,000		195,892,882	100	40.18%	291,607,118	DID
	Non Nakes Covid-19	77,500,000		62,649,332	100	80.84%	14,850,668	DID
	TOTAL	48,016,103,358	3,405,925,565	44,449,550,267	99.70	92.57%	3,566,553,091	

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 44.582.698.384,- dan realisasi sebesar Rp.41.537.132.538,- (93,17%). Dimana kegiatannya adalah :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 21.355.543.017,- terealisasi Rp. 20.942.933.593,- (98,07%), fisik 100%.
- b. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp. 23.227.155.367,- terealisasi Rp. 20.594.198.999,- (88,66%), fisik 100%.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 3.433.404.974,- dan realisasi sebesar Rp. 2.912.417.729,- (84,83%). Dimana jenis kegiatannya adalah :

- a. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 2.425.361.000,- terealisasi Rp. 2.240.973.315,- (92,39%), fisik 99%.
- b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 1.008.043.974,- terealisasi Rp. 671.444.414,- (66,61%), fisik 100%.

Tabel 0.2 Pengukuran Kinerja Utama

Unit Organisasi : RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS	90%	90,18	100,2
	AvLOS	30 Hari	24,28 Hari	119
Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani Spesialis	90%	98,91	109
Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB (79)	BB (79,22)	100,3
Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	48%	53,79	112

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja tahun 2021 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya adalah 90%, realisasi 90,18% dan persentase 100,2%, menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu 90% dengan pencapaian 93,84%, Avlos (Average Length Of Stay) Standar RSJ < 42 Hari targetnya adalah 30 hari, realisasi 24,28 hari dan persentase capaian 119% sama dengan tahun sebelumnya, Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis targetnya 90%, realisasi 98,91% dengan persentase 109%, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RS target 48%, realisasi 53,79% dengan persentase 112%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 47,96% dan Nilai evaluasi SAKIP target BB, realisasi BB (79,22) dengan persentase capaian 100,2%.

Keuangan:

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan di rumah sakit terdiri dari :

a. Anggaran APBD sebesar	Rp. 24.788.947.991
b. Anggaran BLUD	<u>Rp. 23.227.155.367</u>
Jumlah	Rp. 48.016.103.358
Realisasi	Rp. 44.449.550.267
Persentase Capaian	= 92,57%
Pencapaian Fisik	= 99,5 %

Pendapatan BLUD RSJ HB. Saanin	
Target Pendapatan	Rp. 21.886.500.000,-
Realisasi Pendapatan	Rp. 23.912.603.140,-
Persentase Capaian	= 109,26%

Berdasarkan table 0.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kegiatan rata-rata mencapai 100%, ini sesuai dengan target pada Renja tahun 2021, sementara capaian program 100% juga sampai target pada tahun kelima Renstra yaitu 100%. Begitu juga pada table 0.2 diatas bahwa Indikator Kinerja Utama menunjukkan Capaian kinerja Utama rata-rata melebihi target pada Penetapan Kinerja (PK) RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2021.

Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra 2016 – 2021.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan pada BPJS Kesehatan untuk membuka rujukan online ke RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang.
2. Melakukan pendekatan pada BPJS Kesehatan untuk segera dilakukan pembayaran tagihan pasien secepatnya.
3. Mengajukan kredensialing pelayanan non jiwa yang terdiri dari pelayanan Penyakit Dalam, Syaraf, Penyakit Anak dan Rehabilitasi Mental ke BPJS Kesehatan. sebagaimana sudah diatur dalam PMK No 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP No. 47 Tahun 2021, dimana RS Khusus dapat melakukan pelayanan 40% dari TT untuk layanan diluar kekhususannya dan RS sudah melakukan addendum MOU dengan BPJS Kesehatan.

4. Mengupayakan pengembalian Kelas RS menjadi RS khusus Kelas A, antara lain :
 - RS saat ini sudah mendapatkan rekomendasi naik kelas dari Kementerian Kesehatan
 - Proses pengurusan izin operasional menunggu pencabutan SE Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/menkes/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19.
5. Mengembangkan pelayanan RS Non Jiwa (Penyakit Dalam, Anak, Syaraf, dan Rehab Medik).
6. Melakukan efisiensi di belanja BLUD dengan memprioritaskan proses belanja.
7. Meningkatkan koordinasi dengan BPJS untuk pencairan klaim Covid-19 tahun 2020 dan klaim Covid-19 tahun 2021.
8. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk proses pembayaran klaim Covid-19 yang status sudah sesuai dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang.
9. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait pembayaran Piutang Pasien Dinsos.
10. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait rujukan pasien jiwa.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum RS	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi.....	3
1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa.....	3
2. Profil Rumah Sakit Jiwa.....	5
3. Susunan Organisasi dan Tata Laksana	8
D. Aspek Strategis Organisasi.....	10
1. Rencana Strategis RS.....	10
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Matrik Hubungan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran.....	12
4. Strategi dan Kebijakan.....	13
5. Isu-Isu Strategis Kedepan	16
BAB II. PERENCANAAN KERJA	
A. Penetapan Kinerja	19
B. Tabel Penetapan Kinerja	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	31
B. Hasil Pengukuran Kinerja	33
C. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
D. Realisasi Anggaran	51
BAB IV.PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Hambatan	60
C. Solusi.....	61
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	
5. Sertifikat Prestasi Pada Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jenis dan Jumlah Tenaga per Desember 2021	7
Tabel 1.2	Hubungan Hirarkhis Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	12
Tabel 1.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	12
Tabel 1.4	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
Tabel 2.5	Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	21
Tabel 2.6	Tujuan dan Capaian Jangka Menengah Renstra Tahun 2016-2021	21
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama.....	22
Tabel 2.8	Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	23
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Eselon II	24
Tabel 2.10	Formula Cara Pengukuran Indikator Perjanjian Kinerja.....	26
Tabel 2.11	Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja	27
Tabel 3.12	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021	32
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa prima	34
Tabel 3.14	Pengukuran Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	36
Tabel 3.15	Pengukuran Indikator Kinerja: AvLOS (Average Length of Stay)...	39
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa	41
Tabel 3.17	Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	44
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Keuangan RS (TKK).....	45
Tabel 3.19	Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%)TKK.....	47
Tabel 3.20	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Rumah Sakit	44
Tabel 3.21	Pengukuran Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	49
Tabel 3.22	Penghargaan yang diraih Tahun 2021.....	55

A. Gambaran Umum RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kelas “A” dan kapasitas 268 Tempat Tidur, yang aturan pokok operasionalnya mengacu pada:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-538-2011 Tentang Penetapan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

2. Tugas dan Fungsi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mempunyai tugas dan fungsi sbb :

a. Tugas

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mempunyai fungsi :

- 1) Menyenggarakan Pelayanan Medis.
- 2) Menyenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
- 3) Menyenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- 4) Menyenggarakan Pelayanan Rujukan
- 5) Menyenggarakan Pendidikan dan Pelatihan

- 6) Menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang merupakan informasi kinerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, LAKIP ini selanjutnya sebagai pertanggung jawaban hasil kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Disamping itu LAKIP bertujuan untuk menjabarkan hasil capaian kinerja pelayanan kesehatan dari masing-masing unit yang berada di lingkungan RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang baik dari luar yaitu pelayanan extramural seperti pelayanan rujukan. Sehingga terwujud LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbasis kinerja yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Gambaran Umum Organisasi

a. Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa.

Pada tahun 1932 di Padang terdapat dua tempat penampungan orang sakit jiwa. Lokasi pertama dibelakang Rumah Sakit Tentara di Parak Pisang (Sekarang Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo) disebut sebagai *Doorganghuis voorKrankzinnigen*, dan ini merupakan bagian *Militaire Hospital* dan lokasi kedua ditempat RSJ sekarang, disebut sebagai Koloni Orang Sakit Djiwa (KOSD) Ulu Gadut. Di Ulu Gadut ini orang sakit jiwa melakukan kegiatan pertanian (sawah, ladang dan perkebunan). Setelah diresmikan berdiri pada tahun 1932 disebut Rumah Sakit Jiwa Parak Pisang, dan Ulu Gadut adalah tempat Koloni Orang Sakit Djiwa. Pada zaman Revolusi 1945 terjadi

pengungsian orang sakit jiwa secara keseluruhan dari Parak Pisang ke KOSD Ulu Gadut karena situasi semakin tidak aman.

Pada 21 Januari 1947, waktu agresi Belanda terjadi lagi evakuasi/pengungsian karena situasi tidak aman lagi dari Ulu Gadut ke Sawahlunto, menumpang dan bergabung dengan RSU Sawahlunto (Pimpinan RSU waktu itu Dr.H.Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman) kemudian bernama Rumah Perawatan Sakit Jiwa (RPSD). Pada tahun 1954 dilakukan pembangunan kembali serta pemugaran bangsal-bangsal di Ulu Gadut dan pasien dikembalikan secara bertahap, dan KOSD diubah namanya menjadi Rumah Sakit Jiwa Ulu Gadut. Sejak tahun 1961 statusnya diubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Ulu Gadut Padang (kapasitas 110 tempat tidur) dan berakhir sampai tahun 2000. Berdasarkan SK Menkes-Kesos RI No 1732/Menkes-Kesos/2000 tanggal 12 Desember 2000, berubah lagi menjadi RS.Jiwa Daerah Prof. Dr.HB.Saanin Padang sampai sekarang.

Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka RSJ menjadi UPTD Provinsi Sumatera Barat, sehingga tugas dan tanggung jawab berada dibawah Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Tahun 1978 - 2003 dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan RSJ mengacu pada SK Menkes RI No.135/Menkes/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang SOTK RS Jiwa. Tahun 2003 - 2010 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 tahun 2003 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Tahun 2010 terbit Peraturan Daerah Nomor 7 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang SOTK RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja unit

Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan.

5. Profil Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang.

a. Keadaan Rumah Sakit Jiwa

- 1) Nama Rumah Sakit : RS. Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang
- 2) Kelas Rumah Sakit : “ A “
- 3) Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 4) Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut
- 5) Kecamatan : P a u h
- 6) Kabupaten/ Kota : P a d a n g
- 7) Provinsi : Sumatera Barat
- 8) No. Telp / Fax. : (0751) 72001 / (0751) 71379
E-mail : rsjhbsaanin@sumbarprov.go.id
Web : rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id
- 9) Jumlah Tempat Tidur : 268 TT
- 10) Jumlah Bangsal : 12 (dua belas) Unit + 1

Instalasi Napza terdiri dari:

- Anggrek (VIP & Kelas I) = 6 tt
- Ruang Layanan Non Kekhususan (HCU Non Jiwa Kelas I, II & III) = 14 tt
- Flamboyan (Kelas II) = 25 tt
- Cendrawasih (Kelas III) = 35 tt
- Melati (Kelas II & III) = 30 tt
- Merpati (Kelas III) = 34 tt
- Nuri (Non Kelas) = 25 tt
- UPIP I = 8 tt
- UPIP II = 19 tt
- Instalasi Napza (Kelas III) = 20 tt
- Teratai (Klas I,II,III) = 12 tt

- Anrem (Klas I,II,III) = 10 tt
- Mawar (Non Kelas) = 30 tt

11) Sarana dan Prasarana :

Luas Tanah	: 93.609 m ²
Luas Bangunan	: 34.778 m ²
Areal Parkir	: 1.742,5 m ²
Taman	: 3.227 m ²
Fasilitas Air	: Sumur Artesis dan PDAM
Fasilitas Listrik	: PLN 197 kVA dan Genset 500 kVA
Fasilitas Air Limbah	: IPAL 1 Unit

b. Ketenagaan :

Tabel 1.1 Jenis dan Jumlah Tenaga Per Desember 2021

No.	JENIS KETENAGAAN	JUMLAH					JUMLAH
		PNS	CPNS 2019	NON PNS	PTT	REFERAL	
1	STRUKTURAL	19	0	0	0	0	19
2	DOKTER SUB. Sp Jiwa	0	0	1	0	0	1
3	DOKTER Sp.KJ	3	0	1	0	3	7
4	DOKTER Sp. NEUROLOGI	1	0	0	0	0	1
5	DOKTER Sp. PENYAKIT DALAM	1	0	0	0	0	1
6	DOKTER Sp. PATOLOGI KLINIK	1	0	0	0	0	1
7	DOKTER Sp. REHAB MEDIK	0	0	0	0	1	1
8	DOKTER Sp. RADIOLOGI	0	0	0	0	2	2
9	DOKTER Sp. ANAK	1	0	0	0	0	1
10	DOKTER UMUM	9	0	1	0	0	10
11	DOKTER GIGI	2	0	0	0	0	2
12	APOTEKER	4	1	3	0	0	8
13	ASISTEN APOTEKER	9	2	2	0	0	13
14	PSIKOLOG KLINIS	3	0	0	0	0	3
15	PERAWAT	99	9	40	0	0	148
16	NUTRISIONIS	5	1	0	0	0	6
17	PEKERJA SOSIAL	2	0	0	0	0	2
18	PEREKAM MEDIS	6	6	3	0	0	15
19	FISIOTERAPIS	2	0	0	0	0	2
20	OKUPASI TERAPI	0	0	1	0	0	1
21	RADIOGRAFER	1	0	0	0	0	1
22	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1	0	0	0	0	1
23	SANITARIAN	1	1	0	0	0	2
24	TEKNISI ELEKTROMEDIK	2	0	0	0	0	2
25	PRANATA LABOR KESEHATAN	7	0	2	0	0	9
26	PRANATA KOMPUTER	1	0	2	0	0	3
27	ANALIS KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	1
28	ARSIPARIS	0	1	0	0	0	1
29	PELAKSANA	46	2	39	4	0	91
30	PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		249	24	95	4	6	355

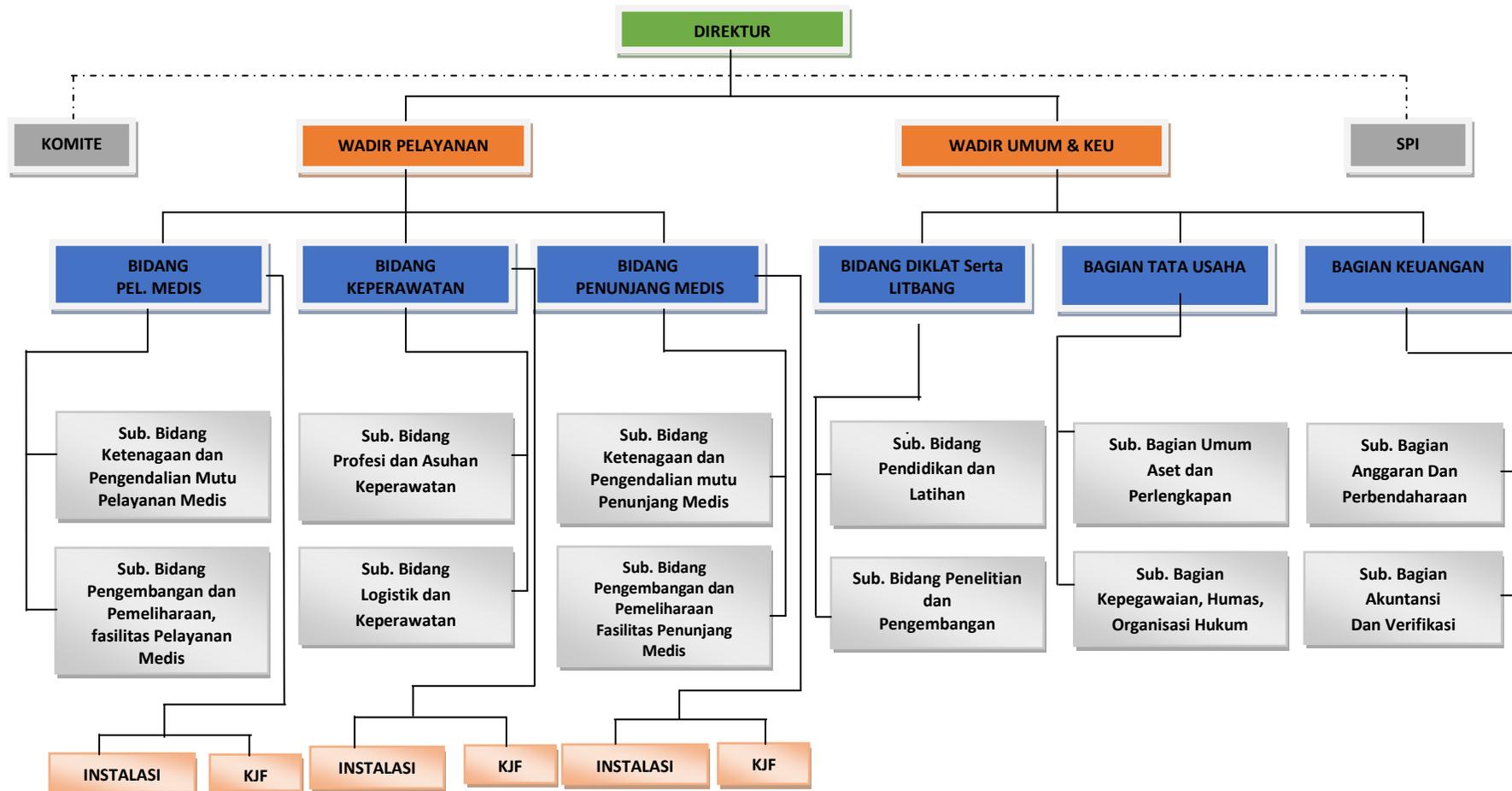
6. Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja

Rumah Sakit Jiwa merupakan rumah sakit pemerintah daerah yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dikelompokkan sebagai berikut :

a. Susunan Struktur Organisasi RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang terdiri dari :

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Bagian
- 4) Bidang
- 5) Komite
- 6) SPI
- 7) Instalasi; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA PROF.DR. HB. SAANIN PADANG



B. Aspek Strategis Organisasi

1. Rencana Strategis : Visi,Misi,Tujuan,Sasaran,Kebijakan,Program

Rencana Strategis yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yang dilaksanakan melalui kebijakan dan Program Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah dengan melibatkan masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sehubungan dengan Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2026 memasuki tahun pertama,

maka berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, SKPD Provinsi juga memasuki Tahun pertama Rencana Strategis SKPD.

Kedudukan Renstra RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2021-2026 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan peranan sebagai pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah/Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Di dalam Perencanaan dan Perjanjian kerja untuk pengembangan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mempunyai Rencana Strategis 2021-2026 yang memperhatikan dinamika perkembangan internal dan eksternal. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan Visi dan Misi rumah sakit.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Memperhatikan visi dan misi yang telah dijabarkan tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2016-2021. Tujuan Misi 1 adalah Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa.Tujuan Misi 2 adalah Terwujudnya Rumah Sakit yang mandiri.

b. Sasaran

- 1) Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kesatu adalah: (1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Prima, (2) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima.
- 2) Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kedua adalah: (1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (2) Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit.

3. Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Hubungan hirarkis antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam periode tahun 2021-2026 RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2 Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI
Pusat unggulan kesehatan jiwa di Indonesia

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran
			2016	2021	
Misi 1: Memberikan pelayanan kesehatan jiwa	Menurunnya Angka Kematian	NDR(Net Death Rate)	0,79	0,24	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima
		GDR(Gross Death Rate)	0,79	0,24	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima.
Misi 2: Meningkatkan kemandirian rumah sakit	Terwujudnya Rumah Sakit Yang Mandiri	Current Rasio (Rasio Lancar)	120	150	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
					Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat dalam tabel seperti dibawah ini:

Tabel 1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

SKPD : RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

Visi : Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa Di Indonesia

Misi : 1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa

2. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Kematian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90	91
			Av Los	44	44	43	42	42	42
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima	Persentase pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis	65	70	75	80	85	90
2.	Terwujudnya Rumah Sakit Yang Mandiri	Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB	BB	BB	A	A	A
		Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	38	40	42	44	46	48

4. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Pada Tujuan 1 strategi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik rawat inap dan rawat jalan, Meningkatkan akses pelayanan kepada pasien terlantar, Meningkatkan budaya kerja yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, Peningkatan kapasitas SDM, kebijakan, SOP dan sarana yang mendukung akreditasi RS dan peningkatan upaya penyuluhan serta promosi tentang kesehatan jiwa masyarakat, meningkatkan cakupan pelayanan dokter spesialis non jiwa dan peningkatan pelayanan penunjang medis yang mendukung pelayanan RS, serta peningkatan pelayanan kepada pasien rehabilitasi NAPZA.

Pada Tujuan 2 strategi yang dibutuhkan adalah: Peningkatan pengelolaan pendapatan pelayanan BLUD, Penataan sistem keuangan professional, Penataan Organisasi sesuai peraturan yang berlaku, Melakukan evaluasi dan monitoring serta pengawasan secara berkala dan Meningkatkan pelatihan SDM berdasarkan kompetensinya.

a. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada Tujuan 1, Strategi 1, adalah Memenuhi sarana dan prasarana pelayanan Medis dan Penunjang Medis baik pada rawat Inap maupun Rawat Jalan, pada strategi 2 adalah Pemulangan Pasien Miskin yang sudah diizinkan pulang oleh Dokter tapi tidak di jemput keluarga dan pemenuhan keterjangkauan obat fornas, pada strategi 3 adalah Menyiapkan RS dalam Survei Akrediasi versi 2012 melalui Work Shop, Bimbingan, Survey Simulasi dan Survey Akreditasi. Strategi 4 adalah Pengelolaan pelayanan dokter spesialis non jiwa secara akuntabel dan pada Strategi 5 adalah Pengelolaan pelayanan penunjang medis secara akuntabel, strategi 6 Pengelolaan pelayanan rehabilitasi NAPZA.

Arah Kebijakan pada Tujuan 2 Strategi 1 adalah pengelolaan pendapatan dan pengembangan pelayanan yang meningkatkan pendapatan RS, pada strategi 2 adalah efisiensi dan akuntabilitas keuangan yang prima, pada strategi 3 adalah peningkatan kemampuan organisasi dalam memenuhi peraturan yang berlaku, pada strategi 4 adalah pengukuran indikator kinerja yang dapat diandalkan dan pada strategi 5 adalah terukurnya produktivitas unit dan individual staf.

Tabel 1.4		Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan		
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Memberikan pelayanan kesehatan jiwa	Menurunnya Angka Kematian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik rawat inap dan rawat jalan	Memenuhi sarana dan prasarana pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
			Meningkatkan akses pelayanan kepada pasien miskin dan Terlantar	Pemulangan Pasien Miskin/Terlantar dan pemenuhan keterjangkauan obat fornas dan pemenuhan makan dan minum pasien terlantar.
			Meningkatkan budaya kerja yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan	Meningkatkan perilaku pegawai dalam melayani dan cepat tanggap dalam penanganan keluhan
			Peningkatan kapasitas sdm, kebijakan, sop dan sarana yang mendukung akreditasi RS	Menyiapkan RS dalam Survei Akreditasi SNARS versi 1
			Peningkatan upaya penyuluhan dan promosi tentang kesehatan jiwa masyarakat	Meningkatkan jumlah penyuluh kesehatan dan kegiatan promosi kesehatan masyarakat.
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan	Meningkatkan cakupan pelayanan dokter spesialis non jiwa.	Pengelolaan pelayanan dokter spesialis non jiwa secara akuntabel.
			Peningkatan pelayanan	Pengelolaan pelayanan

		prima	penunjang medis yang mendukung pelayanan RS	penunjang medis secara akuntabel
			Peningkatan pelayanan kepada pasien rehabilitasi NAPZA	Pengelolaan pelayanan Rehabilitasi NAPZA
Misi 2: Meningkatkan kemandirian rumah sakit	Terwujudnya Kemandirian RS Jiwa Prof.HB.Saan in Padang	Meningkatnya Tata kelola RS	Peningkatan pengelolaan pendapatan pelayanan BLUD	Pengelolaan pendapatan dan pengembangan pelayanan yang meningkatkan pendapatan RS
		Meningkatnya Kemandirian RS	Penataan sistem keuangan professional	Efisiensi dan akuntabilitas keuangan yang prima
			Penataan Organisasi sesuai peraturan yang berlaku	Peningkatan kemampuan organisasi dalam memenuhi peraturan yang berlaku
			Melakukan evaluasi dan monitoring serta pengawasan secara berkala	Pengukuran indikator kinerja yang dapat diandalkan
			Meningkatkan pelatihan SDM berdasarkan kompetensinya	Terukurnya produktiitas unit dan individual staf

5. Isu-isu Strategis Kedepan

Isu-isu strategis yang dihadapi RS Jiwa HB Saanin Padang berdasarkan identifikasi permasalahan; telaahan visi, misi, dan program Gubernur & Wakil Gubernur, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

- 1) Meningkatnya populasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan, mengharuskan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang melakukan peningkatan dan pengembangan layanan rumah sakit khususnya dalam rangka kebijakan peningkatan pelayanan publik pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan ketersediaan SDM dan mindset pegawai dengan orientasi terhadap pelanggan belum maksimal, sehingga ada kemungkinan terjadinya ketidakpuasan pelanggan yang berkaitan dengan service yang diberikan;
- 2) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)/Badan Pengelola Jaminan Sosial yang mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Januari 2014 dan Peningkatan Jumlah Peserta sampai 2019 menjadi 100% dan adanya kebijakan pemerintah bebas pasung. Ini merupakan tentang RS Jiwa Prof HB Saanin Padang sebagai RS Rujukan Kesehatan Jiwa satu-satunya di Sumatera Barat untuk meningkatkan pelayanan baik secara kuantitas maupun kualitas dengan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai.
- 3) Standar Akreditasi RS Nasional. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem akreditasi nasional Tahun 2012 yaitu: mengandung hal-hal yang optimal dan dapat dicapai, memperlihatkan komitmen organisasi untuk peningkatan mutu pelayanan pada pasien, menjamin keselamatan lingkungan, dan secara terus menerus mengurangi risiko pasien dan karyawan, dan sebagai alat evaluasi tentang mutu dan manajemen yang efektif.
- 4) Kebijakan Pemerintah yang memberi izin bagi negara asing untuk membuka rumah sakit di Indonesia, sehingga persaingan terbuka semakin lebar (AFTA 2015 bidang kesehatan) menuntut dilakukannya Reformasi kelembagaan rumah sakit dalam rangka RS BLUD guna meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan

masyarakat dan reformasi birokrasi kesehatan bagi seluruh RS di Indonesia yang berstandar kelas dunia;

- 5) Persoalan Kesehatan Jiwa diperberat dengan permasalahan gangguan Non Kejiwaan yang mengiringinya termasuk masalah penggunaan Napza semakin luas karena strategy "*supply reduction*" yang tumpul dan tidak ditunjang dengan strategi "*demand reduction*" dan "*harm-reduction*" yang efektif. Sejatinyalah RS Jiwa menjadi salah satu *stakeholder* terpenting dalam memberikan pelayanan Non Jiwa dalam rangka mencapai Derajat Kesehatan Jiwa Yang Prima.

Secara garis besar, isu strategis utama yang dihadapi RS Jiwa Prof HB Saanin Padang yaitu ***"Tuntutan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Pelayanan Kesehatan Non Jiwa Yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima, dan tuntutan Peningkatan Kemandirian BLUD"***.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Proses perencanaan kinerja RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat digambarkan berdasarkan penjelasan berikut:

1. Tujuan dan Sasaran RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

a. Tujuan

Memperhatikan visi dan misi yang telah dijabarkan tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2021-2026. Tujuan Misi 1 adalah Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa. Tujuan Misi 2 adalah Terwujudnya Rumah Sakit yang mandiri.

b. Sasaran

- 1) Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kesatu adalah:
 - (1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Prima,
 - (2) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang
Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima.
- 2) Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kedua adalah:
 - (1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
 - (2) Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit.

1. Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.5 Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI : Pusat unggulan kesehatan jiwa di Indonesia		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Memberikan pelayanan kesehatan jiwa	Menurunnya Angka Kematian	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Prima
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima
Misi 2: Meningkatkan kemandirian rumah sakit	Terwujudnya Rumah Sakit yang Mandiri	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
		Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit

2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.6		Tujuan dan Capaian Jangka Menengah Renstra Tahun 2016-2021							
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka Kematian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90	91
			Av Los	44	44	43	42	42	42
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima	Persentase pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis	65	70	75	80	85	90
2	Terwujudnya Rumah Sakit Yang Mandiri	Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB	BB	BB	A	A	A
		Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	38	40	42	44	46	48

Untuk mencapai tujuan dan sasaran mengacu pada Renstra SKPD yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja (PK), sebagaimana susunan rencana strategis dan program pada tabel 1 Rencana Strategis, dan tabel 2.7 Penetapan Kinerja sbb :

3. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama

Agenda/Prioritas /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berdasarkan Survei	Bidang Diklat
	Av Los	$avlos = \frac{\text{Jumlah hari rawatan pasien keluar}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup/mati)}}$	Bidang Pelayanan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa Yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase pasien Non Jiwa yang Ditangani Spesialis	$\text{Persentase pasien non jiwa} = \frac{\text{Jumlah pasien non jiwa yang ditangani oleh dokter spesialis}}{\text{Jumlah pasien non jiwa di poliklinik}} \times 100$	Bidang Pelayanan
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	$TKK = \frac{\text{Jumlah Pendapatan BLUD}}{\text{Jumlah belanja seluruhnya}} \times 100$	Bidang Keuangan
Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Penilaian Lakip Inspektorat	Bidang Keuangan dan TU

Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Nama OPD : RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91%
		AvLOS	42 Hari
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis	90%
3	Meningkatkan Kemandirian Keuangan RS	Tingkat Kemandirian Keuangan	48%
4	Meningkatnya Tata Kelola RS	Nilai Evakuasi SAKIP SKPD	Nilai A

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2021 RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini;

B. TABEL PENETAPAN KINERJA

Tabel 2.9		Perjanjian Kinerja Eselon II	
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%
		AvLOS (IKU)	30 Hari
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa Yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	90%
3	Meningkatkan Kemandirian Keuangan RS	Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	48%
4	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 42.787.467.594,00	APBD dan BLUD
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Rp 2.425.361.000,00	APBD

Tabel 2.9 **Formula Cara Pengukuran Indikator Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	HASIL PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	BERDASARKAN SURVEI	BERDASARKAN SURVEI	Bidang Diklat
		AvLOS (IKU)	$avlos = \frac{\text{Jumlah hari rawatan pasien keluar}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup/mati)}}$	$Avlos = \frac{55373}{2114}$ $= 26 \text{ Hari}$	Bidang Pelayanan
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa Yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	$\text{Persentase pasien non jiwa} = \frac{\text{Jumlah pasien non jiwa yang ditangani oleh dokter spesialis}}{\text{Jumlah pasien non jiwa di poliklinik}} \times 100$	$\text{Persentase pasien non jiwa} = \frac{1721}{1932} \times 100\%$ $= 89,07\%$	Bidang Pelayanan
3	Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP	Penilaian Inspektorat	Penilaian Inspektorat	Bidang Keuangan
4	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	$TKK = \frac{\text{Jumlah Pendapatan BLUD}}{\text{Jumlah belanja seluruhnya}} \times 100$	$TKK = \frac{21.808.600.256}{45.467.892.744} \times 100\%$ $= 47,96\%$	Bagian Keuangan

1. PERBANDINGAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN TERAKHIR RENSTRA 2021-2026

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Eselon II

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%	91%
		AvLOS (IKU)	30 Hari	42 Hari
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa Yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	90%	90%
3	Meningkatkan Kemandirian Keuangan RS	Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	48%	48%
4	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB	A

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja tahun 2021 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya adalah 90%, target tahun 2021 91% dan Avlos (*Average Length Of Stay*) Standar Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Jiwa <42 Hari, target tahun 2021 adalah 30 hari dan untuk tahun 2021 42 hari, Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis target tahun 2021 90% dan target tahun 2021 90%, Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RS target tahun 2021 48% dan target tahun 2021 48% dan Nilai evaluasi SAKIP target tahun 2021 BB dan target tahun 2021 A.

Tabel 2.11

Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA																		
RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG																		
TAHUN 2021																		
OPD	: RS. Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang																	
Visi	: Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa di Indonesia																	
Misi	: 1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa 2. Meningkatkan kemandirian Rumah Sakit																	
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROPORSI BELANJA PENCAPAIAN IBU TERHADAP TOTAL BELANJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III								
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS	-	-	-	90%	Preferensi Unik Layanan Pengaduan dan Membuat jalur pengaduan Melakukan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat yang telah masuk Melakukan Survey Indeks Kepuasan Internal Melakukan Survey Indeks Kepuasan Eksternal Menyelenggarakan Survey Indeks Kepuasan Internal Kepala Bidang Bagian Menyelenggarakan Survey Indeks Kepuasan Eksternal Kepala Instalasi Bidang Bagian Penilaian dan pemberian bagi pegawai dalam penanganan publik service Penyebaran rekomendasi peningkatan layanan masyarakat Tahun lalu					Peningkatan Pelayanan BLUD Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan Bekerja Model BLUD Peningkatan honorarium PTT Bermanfaat honorarium Non PNS Bermanfaat Karir, Sosial dan Bimbingan Teknis PNS Penyalahgunaan jasa kantor	Indeks survei kepuasan masyarakat yang dilakukan Jumlah pengaduan melalui model pengaduan dan survei BLUD yang dilakukan Jumlah paket pembangunan Gedung dan bangunan yang dilaksanakan Persentase terlaksananya honorarium PTT selama 1 tahun Persentase terlaksananya benefit honorarium Non PNS selama 1 tahun Persentase terlaksananya program karir, sosial dan bimbingan teknis PNS selama 1 tahun Persentase terlaksananya kegiatan penyalahgunaan jasa kantor selama 1 tahun	2 ksp	2 ksp	61.500.000	0	43,22
												41 unit	1 unit	138.045.000	49.005.000			
												2 paket	2 paket	475.000.000	402.754.995			
												100%	80%	149.760.771	128.205.855			
												100%	82%	4.371.158.718	3.569.063.267			
												100%	23%	161.930.000	38.139.773			
												100%	92%	938.660.000	865.505.519			

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (*Planning*) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan berfungsi sebagai *actuating* dan pertanggungjawaban pelaksanaannya sebagai fungsi *controlling*.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat/mengevaluasi sejauh mana program, kegiatan dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan, dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) untuk mengukur sasaran.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori seperti tabel 3.12.

Tabel 3.12**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021**

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran yaitu:

- a. Skala penilaian pengukuran Indikator Sasaran yang mempunyai makna progres positif:

Skor	Kategori Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75 sampai dengan 100%	Baik
2	55% sampai <75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

- b. Skala penilaian pengukuran Indikator Sasaran yang mempunyai makna progres negatif:

Skor	Kategori Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang
2	75 sampai dengan 100%	Cukup
3	55% sampai <75%	Baik
4	Kurang dari 55%	Sangat Baik

Persentase (%) dari hasil bagi antara capaian dengan target yang dimasukkan ke dalam skala penilaian tersebut menghasilkan besaran Skor Indikator. Penjumlahan beberapa besaran Skor Indikator dibagi dengan jumlah Indikator dalam satu sasaran, menghasilkan besaran skor sasaran. Seterusnya penjumlahan beberapa besaran skor sasaran dibagi dengan jumlah sasaran dalam satu tujuan, menghasilkan besaran skor tujuan.

Pengukuran kinerja RS. Jiwa. Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS	90%	90,18	100,2
	AvLOS	30 Hari	24,28 Hari	119
Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani Spesialis	90%	98,91	109
Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB (79)	BB (79,22)	100,3
Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	48%	53,79	112

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja tahun 2021 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya adalah 90%, realisasi 90,18% dan persentase 100,2%, menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu 90% dengan pencapaian 93,84%, Avlos (Average Length Of Stay) Standar RSJ < 42 Hari targetnya adalah 30 hari, realisasi 24,28 hari dan persentase capaian 119% sama dengan tahun sebelumnya, Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis targetnya 90%, realisasi 98,91% dengan persentase 109%, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RS target 48%, realisasi 53,79% dengan persentase 112%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 47,96% dan Nilai evaluasi

SAKIP target BB, realisasi BB (79,22) dengan persentase capaian 100,2%.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang beserta perbandingan dari tahun ke tahun disajikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan meningkatnya pelayanan kesehatan Non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.

a. Sasaran 1:

Pada sasaran 1 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS dan AvLOS.

Tujuan 1	Sasaran 1
Menurunnya Angka Kematian	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Prima

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Sasaran:
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Prima

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit	90%	90,18%	100,2%
2	AVLOS	30 Hari	24,28 Hari	119%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 3.13 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa

di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada tahun 2021, rata-rata sebesar 109,6% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu): 1 Indikator melewati target, dan 1 indikator perlu peningkatan pencapaian realisasi. Selanjutnya capaian masing-masing indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit

Kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan di RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang dengan 14 elemen indeks kepuasan yang sudah ditetapkan Kemenpan dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan oleh Bidang Diklat dan Litbang RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang dilakukan rutin setiap tahunnya.

Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk menjaga hasil survey tetap valid, pihak rumah sakit menyerahkan pelaksanaan survey kepada pihak yang independen dalam hal ini diluar RS. Pada tahun 2021 ini survey dilakukan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Andalas Padang.

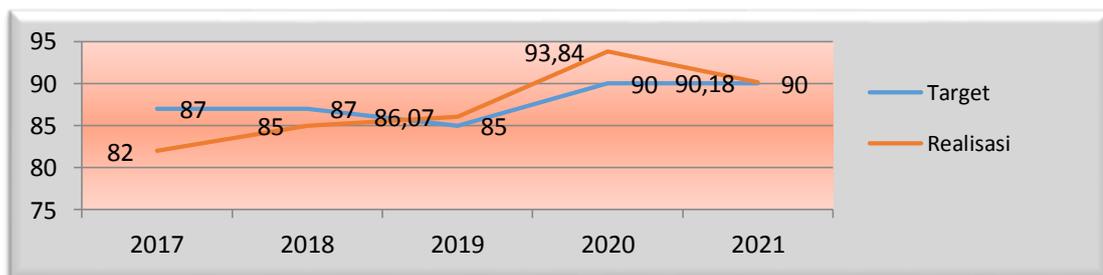
Realisasi IKM tahun 2021 adalah 90,18%. Bila dibandingkan dengan target nilai IKM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan (90%), maka dapat diketahui persentase capaian IKM tahun 2021 adalah sebesar 100,2%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Secara Nasional berdasarkan Permenpan & RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, nilai IKM RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang termasuk pada rentang nilai 88,31 – 100 dengan kategori **Sangat Baik**.

Pada tahun 2021 penilaian IKM dilakukan satu periode, yang dilakukan oleh lembaga independen (eksternal) dengan hasil rata rata 90,18 %.

Jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14		Pengukuran Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									
No	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	82	87	85	85	87	82	87	85	93,84

Trend Perkembangan Nilai IKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2021 realisasinya menurun dibandingkan Tahun 2020. Hal ini disebabkan Karena salah satunya pandemi covid-19 yang membuat pelayanan yang dilakukan jadi tidak efektif, adanya jarak dan PSBB yang membuat interaksi antara petugas dan pasien jadi berkurang, dan pelayanan menjadi lama karena prosedur pelayanan Covid-19 yang harus di ikuti.

Pencapaian IKM tahun 2021 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh rumah sakit diantaranya:

- a) Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan khususnya yang meningkatkan pelayanan Publik. Dengan biaya yang

dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000 berasal dari dana RBA BLUD.

- b) Peningkatan sarana prasarana yang menunjang pelayanan dan pengembangan layanan RS sehingga dapat diakses lebih mudah oleh Masyarakat. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 475.000.000 berasal dari Belanja RBA BLUD dan Rp. 3.433.404.974 dari APBD.
- c) Pemberian informasi secara kontiniu kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (*leaflet, barner, running Teks, media cetak maupun elektronik*). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut Rp. 28.480.000,- dari dana RBA BLUD.
- d) Peningkatan pelayanan dengan menggunakan Tekhnologi Informasi sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Biaya dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 144.820.000,- dari dana RBA BLUD.
- e) Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan ruangan pengaduan dan memperbanyak kotak pengaduan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhannya.
- f) Untuk penanganan Covid-19 pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut adalah pembayaran insentif nakes dan non nakes penanganan Covid-19 adalah Rp. 565.000.000 berasal dari dana DAU APBD.

Sementara masih diperlukan perbaikan dan peningkatan tentang perilaku petugas dan sarana dan prasana pendukung pada poliklinik seperti :

- a) Mensosialisasikan keberadaan unit pengaduan pelayanan dan fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat seperti aplikasi pengaduan SP4N LAPOR, pengaduan via whatsapp, email, dll.

- b) Menempatkan alur pengaduan yang mudah dan jelas agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat apabila akan menyampaikan pengaduan pelayanan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
- c) Untuk mempermudah penyampaian pengaduan di masa transisi dari manual ke digital, diusulkan untuk menempatkan papan tulis (*White board*) pada ruang-ruang layanan publik, sehingga masyarakat bisa menuliskan keluhan secara langsung pada papan tersebut dan hasilnya dapat di rekap harian oleh Tim Pengaduan Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
- d) Memberikan informasi terkait kedatangan dokter
- e) Petugas memulai pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan
- f) Menjaga stabilitas jaringan internet agar melancarkan proses input resep pasien BPJS.
- g) Meningkatkan kinerja cleaning service agar lebih intensif untuk membersihkan toilet dan menjaga ketersediaan air di toilet.
- h) Meningkatkan maintenance Gedung, dengan melakukan pengecatan ulang ruangan dan juga melengkapi sarana penerangan di bagian Gedung/ruangan yang sering di akses, sehingga terlihat bersih dan nyaman sehingga masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang ada di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

2). AvLOS

AvLOS (*Average Length of Stay*) atau angka rata-rata lama pasien dirawat adalah perbandingan jumlah lama pasien dirawat dengan jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati. Dalam penilaian ini semakin kecil realisasi dari target yang telah ditetapkan maka dianggap pencapaian lebih baik.

$$AVLOS = \frac{\text{Jumlah Lama Pasien Dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup/Mati)}}$$

Adapun cara perhitungannya menggunakan Rumus :

$$AvLOS = \frac{2 \times \text{Target} - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Realisasi AvLOS tahun 2021 adalah 24,28 Hari , Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 30 hari, maka dapat diketahui persentase capaian AvLOS tahun 2021 adalah sebesar 119%, ini berarti skala penilaiannya **Sangat Baik**. Sementara jika dibandingkan dengan target AvLOS yang ditetapkan Kemenkes untuk pasien jiwa sebesar 42 hari berarti capaian AvLOS pada tahun 2021 sudah dibawah target Nasional.

Bila dibandingkan dengan AvLOS tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3.15		Pengukuran Indikator Kinerja: AvLOS (Average Length of Stay)									
		2017		2018		2019		2020		2021	
No	Indikator Kinerja	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea
1	AvLOS (Average Length of Stay)	44	39	43	34	44	39	43	34	30	24,28

Trend Perkembangan AvLOS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi AvLOS Tahun 2021 dibawah target. Hal ini berarti pencapaiannya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Pencapaian tahun ini (24,28 hari) bila dibandingkan dengan tahun 2020 (26 hari), terdapat selisih 1,72 hari. Capaian tersebut dibawah dengan Standar Depkes untuk RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang idealnya 42 hari, realisasi 24,28 hari

sehingga terdapat selisih 4.38 hari dari target. Hal ini disebabkan karena:

- a) Adanya koordinasi antara RS dengan Dinas Sosial Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga pasien yang ditanggung Dinas Sosial yang sudah dinyatakan boleh pulang oleh Dokter, bisa dipulangkan ke alamat keluarganya. Biaya dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 22.000.000 untuk pemulangan pasien dari dana RBA BLUD.
- b) Mengadakan pertemuan keluarga guna membantu dalam pemahaman keluarga untuk kebutuhan pasien pasca pulang.
- c) Melaksanakan *Clinical pathway* untuk 5 Diagnosa medis terbanyak yang membantu kendali mutu dan kendali biaya. Biaya untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- untuk cetak rekam medis berasal dari dana RBA BLUD.
- d) Untuk penanganan Covid-19 pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut adalah pembayaran insentif nakes dan non nakes penanganan Covid-19 adalah Rp. 565.000.000 berasal dari dana DAU APBD.

Untuk mempertahankan capaian tersebut RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang selalu melakukan upaya antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Sosial agar dapat menyiapkan tempat/panti/rumah singgah bagi pasien yang dinyatakan sudah dapat dipulangkan.
- b) Meningkatkan partisipasi keluarga dalam proses perawatan melalui pendidikan kesehatan kepada keluarga yang berkunjung ke Rumah Sakit.
- c) Menganggarkan kegiatan *dropping* pasien atau memulangkan pasien pada keluarganya terutama bagi keluarga miskin.
- d) Meningkatkan pelaksanaan *Clinical Pathway* menjadi 10 Diagnosa terbanyak untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya.

2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima meliputi upaya kesehatan diluar psikiatri (Penyakit dalam, Syaraf, Anak, Gigi/Mulut dan Rehabilitasi Medik) baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya mutu pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima.

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis.

TUJUAN 1	SASARAN 1
Menurunnya Angka Kematian	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.16:

Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima
------------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	90%	98,91%	109%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, menunjukkan bahwa realisasi pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada tahun 2021 adalah 109% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Dari 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 2 (dua): hasilnya melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1) Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis

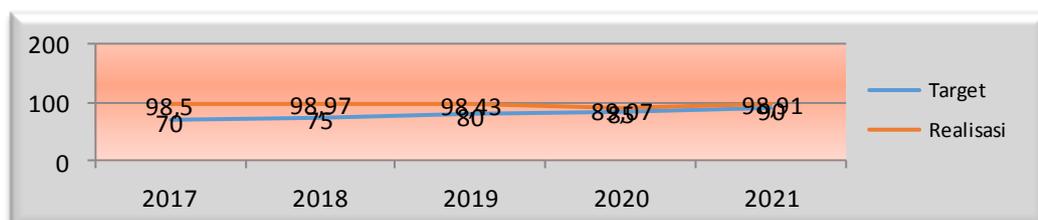
Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis adalah jumlah pasien non psikiatri (penyakit dalam, penyakit syaraf, anak, dan pelayanan gigi) yang ditangani oleh dokter spesialis dibanding dengan jumlah pasien non psikiatri yang datang berobat x 100.

Realisasi Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2021 adalah 98,91%. Bila dibandingkan dengan target Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan (90%), ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun sebelumnya dapat dilihat dari table 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.17		Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis									
		2017		2018		2019		2020		2021	
No	Indikator Kinerja	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	70	98,5	75	98,9	80	98,4	85	89,0	90	98,91

Trend Perkembangan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan hasil persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2021 realisasinya meningkat dari tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk Penambahan Pelayanan Non Jiwa di luar Pelayanan Jiwa yang dilayani oleh dokter spesialis seperti Spesialis Penyakit dalam, Spesialis Syaraf dan Anak. Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih ada sehingga masih membuat menurunnya kunjungan pasien ke RS. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021 yaitu sebesar 90%, pencapaian Tahun 2021 melebihi target Renstra dengan selisih sebesar 8,91%.

3. Meningkatkan kemandirian Rumah Sakit

Tujuan Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS dalam melaksanakan tata kelola RS dan membiayai seluruh pengeluaran baik operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan RS, kemampuan dalam mengelola SDM dan tata kelola RS. Tujuan kedua dapat diukur dengan 2 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit.

a. Sasaran 1:

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat kemandirian keuangan RS (TKK)

Tujuan 1	Sasaran 1
Terwujudnya Rumah Sakit yang Mandiri	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18 **Pengukuran Kinerja Sasaran:**
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)	48%	53,79%	112%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 3.18 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kemandirian keuangan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2021 sebesar 112% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1) Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS membiayai seluruh biaya rumah sakit, dari pendapatan murni rumah sakit.

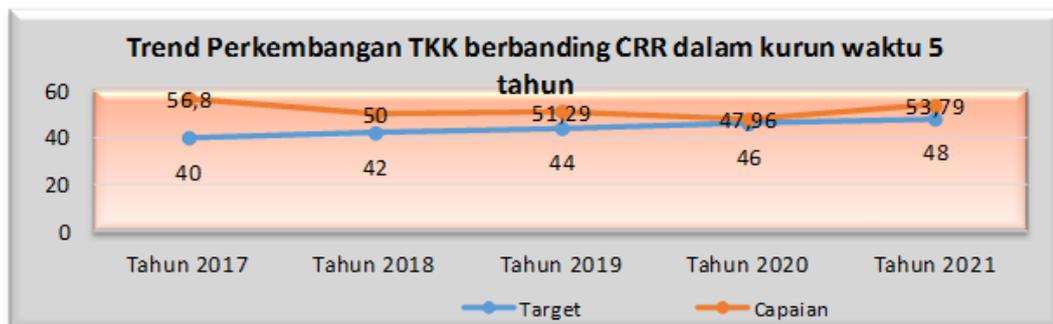
TKK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan pelayanan pasien (*Revenue*). TKK dihitung dari persentase perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya belanja rumah sakit dengan nilai idealnya diatas 40%.

Realisasi TKK Tahun 2021 sebesar 53,79%, hal ini menunjukkan persentase capaian TKK Tahun 2021 adalah sebesar 112%. Dengan skala penilaian **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan TKK secara nasional adalah minimal 40%, TKK RS Jiwa Prof HB Saanin sudah berada pada rentang diatas standar minimal Nasional.

TKK merupakan indikator yang baru diperhitungkan mulai tahun 2017, namun demikian pada laporan ini sebagai pembandingan tingkat capaian dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19		Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%)TKK									
No	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea	Trgt	Rea
1	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	40	56,8	42	50	40	56,8	42	50	48	53,79

Trend Perkembangan TKK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa TKK tahun 2021 capaiannya bertambah dari Tahun 2020. Hal ini dikarenakan masuknya klaim BPJS, Klaim Pasien Covid-19 sehingga pendapatan Rumah Sakit dapat terealisasi melebihi target. Selain itu terjadi penurunan jumlah pasien rawat jalan disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RSUD kelas D,C,B dan A.

Pencapaian TKK tahun 2021 dengan kategori **Sangat Baik** didukung oleh Pendapatan RS, Belanja APBD dan Belanja BLUD, diantaranya :

1. Target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 21.886.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.912.603.140,- dengan pencapaian 109,26%.
2. Belanja APBD dimana target belanja APBD sebesar Rp. 24.788.947.991,- terealisasi sebesar Rp. 23.855.351.268,- dengan persentase 96,23%. Kegiatannya diantaranya Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN), Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan), Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Operasional Pelayanan Rumah Sakit).
3. Belanja BLUD target belanja Rp. 23.227.155.367,- realisasi Rp. 20.594.198.999,- dengan persentase capaian 88,66%, kegiatannya adalah peningkatan pelayanan BLUD RS.
4. Total Pendapatan BLUD pada tahun 2021 adalah Rp. 23.912.603.140, dan Total pengeluaran BLUD ditambah APBD adalah Rp. 44.449.550.223.

Permasalahan yang terjadi pada pada tahun 2021 adalah :

1. Surat edaran dari BPJS Kesehatan tentang rujukan berjenjang mengakibatkan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap mengalami penurunan, sehingga pendapatan RS menurun
2. Turunnya kelas RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang menjadi kelas B pada tahun 2019 mengakibatkan penurunan klaim BPJS Kesehatan sebesar 60% dari kelas A
3. Terjadinya pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.

Solusi yang akan dilakukan untuk menangani masalah tersebut :

1. Melakukan efisiensi terhadap belanja BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar dapat memenuhi target belanja
2. Meningkatkan layanan pasien jiwa maupun non jiwa dengan memberdayakan tenaga dan sumber daya yang ada di rumah sakit
3. Mengajukan kenaikan kelas RS kepada Kemenkes untuk bisa kembali ke kelas A dan sudah mendapatkan surat penetapan dari Kemenkes RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YR.05.01/III.3/4755/2021 tanggal 11 November 2021. Sementara untuk surat izin operasional (SIO) menunggu perubahan surat edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/menkes/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19.

b. Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola RS.

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD.

Tujuan 1	Sasaran 1
Terwujudnya RS yang Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Rumah sakit

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.20		Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Rumah Sakit		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB (79)	B (79,22)	100,2

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 3.20 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tata kelola di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2021 berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 100,2% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

2) Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP.

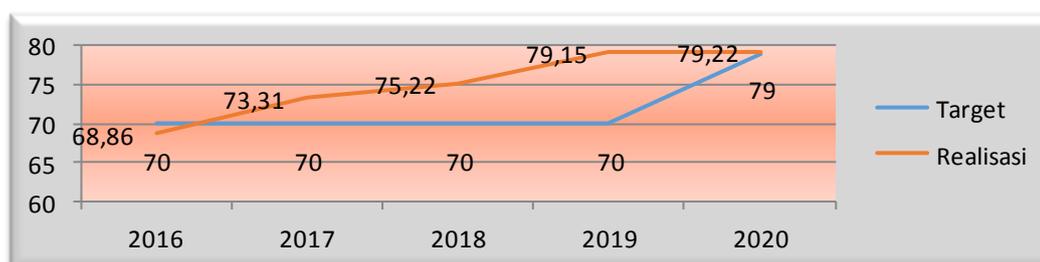
Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen: Komponen pertama adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Komponen kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. Komponen ketiga adalah pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Komponen ke empat adalah evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi dan komponen ke lima adalah pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja lainnya.

Realisasi SAKIP tahun 2021 merupakan hasil penilaian dari LAKIP Tahun 2020 dengan nilai adalah BB (79,22). Bila dibandingkan dengan target nilai LAKIP RS.Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan BB (79), maka dapat diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2020 adalah sebesar 100,2%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Realisasi nilai LAKIP tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari tabel 3.21 dibawah ini:

Tabel 3.21 **Pengukuran Indikator Kinerja:**
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Trgt	Rea								
1	Nilai Evaluasi Sakip SKPD	70	68,86	70	73,31	70	75,22	70	79,15	79	79,22

Perkembangan Nilai LAKIP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai LAKIP Tahun 2020, berada pada kategori BB dengan nilai 79,22.

Pencapaian LAKIP pada tahun 2020 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit diantaranya:

- a) Melibatkan semua unsur bidang/ bagian untuk terlibat dalam perencanaan sehingga perencanaan menjadi suatu acuan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan.
- b) Melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk setiap triwulan sehingga dapat diantisipasi segala kendala dengan cepat.
- c) Melakukan pengukuran terhadap kinerja eselon III dan eselon IV.
- d) Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui e-SAKIP.

Untuk peningkatan LAKIP di tahun 2021 sudah dilakukan:

1. Pengembangan IT dalam perjanjian dan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi yang bernama SIPOLIN (Sistem Pengukuran Kinerja Online).
2. Melakukan revisi perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja dari eselon II, III, IV dan staf sehingga sasaran, indikator, dan target sudah memiliki hubungan kasualitas dan *breakdown* dari atasan.
3. Membuat pelaporan Rencana Aksi setiap triwulan yang laporannya disampaikan ke Biro Organisasi.

I. Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Indikator	Tahun 2021	
	Target	Realisasi
BOR	84	59,49%
AVLOS	30 Hari	24,28 Hari
BTO	4 Kali	8,79 Kali
TOI	6 Hari	19,82 Hari
NDR	0,79%	0,42
GDR	0,79%	0,55
Jumlah Hari Perawatan	88.000 Hari	58.191 Hari
Jumlah Pasien Masuk	1.500 org	2.385 Org
Kunjungan Rawat Jalan	27.000 org	29.517 Org
Kunjungan Rawat Inap	1.600 org	2.515 Org
Jumlah Pasien Keluar	1.500 org	2.356 Org
Jumlah Hari Perawatan Pasien Keluar	65.000 Hari	57.195 hari

D. Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan suatu badan publik dapat dilihat keberhasilannya dengan menilai perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rasio tersebut antara lain :

Pertama Rasio efektifitas yaitu pengukuran untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang menggambarkan data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \text{Realisasi pendapatan} / \text{Target pendapatan} \times 100\%$$

Kedua Rasio Efisiensi untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data realisasi belanja dan target anggaran belanja. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{realisasi belanja} / \text{target anggaran belanja} \times 100 \%$$

Berikut adalah hasil kinerja anggaran RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun anggaran 2021.

1. Pendapatan Pelayanan BLUD

RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan SKPD dengan PPK BLUD sehingga pendapatan dihasilkan dari Pelayanan BLUD dan pendapatan lain yang sah, Target pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp. 21.886.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.912.603.140,- dengan pencapaian 109,26%. Berdasarkan hal tersebut maka Rasio Efektifitas dari kinerja keuangan termasuk kategori **Sangat baik**. Pendapatan melebihi target, walaupun masih adanya penurunan kunjungan pasien ke RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang akibat mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RS kelas D,C,B dan A dan karena terjadinya pandemi covid-19 akan tetapi klaim pembayaran

BPJS khusus pasien jiwa, pasien umum dan pasien Covid-19 sudah cair dan bisa meningkatkan pendapatan RS pada tahun 2021.

2. Belanja Anggaran OPD

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana 100%, terealisasi Rp. 20.942.933.539 dengan pencapaian keuangan 98,07%. Permasalahan tidak ditemukan karena gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang

Dari target anggaran BLUD untuk kegiatan pelayanan BLUD sebesar Rp.23.227.155.367,- terealisasi sebesar Rp. 20.594.198.999,- dengan pencapaian (Keuangan = 88,66%, Fisik =100%). Kegiatan tercapai fisik 100%, realisasi anggaran pembayaran sesuai kegiatan, terdapat efisiensi anggaran. Dampak dari kegiatan pelayanan BLUD ini adalah berpengaruh besar pada capaian indikator kinerja utama yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 90,18%, menurunnya Avlos dari 30 hari menjadi 26,55 hari dan Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) 53,79%. Meningkatnya pelatihan pada petugas RS, meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS, tercapainya kalibrasi alat kesehatan tepat waktu, disamping terwujudnya pelayanan promosi kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan disiplin aparatur.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

a) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Dari ketersediaan dana APBD untuk Alat Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (DAK) Rp. 725.361.000,- terealisasi sebesar Rp. 697.540.165,- dengan pencapaian (Keuangan = 96,16 %, Fisik = 100%). dan alat kesehatan yang sumber dana dari DBHCHT dengan anggaran Rp.400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 378.480.900,- dengan pencapaian (Keuangan = 94,62%, Fisik 95%). Hasil pekerjaan kegiatan sudah selesai sesuai dengan kontrak sehingga tercapai fisik 98% karena ada satu kegiatan tidak bisa terlaksana penyebabnya adalah kegiatan turun tayang di e katalog dan tidak bisa terealisasi karena tidak terjadi kesepakatan harga ketiga negosiasi alat. pembayaran sesuai dengan kontrak, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 49.339.935,-. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana alat kesehatan RS.

b) Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Ketersediaan dana APBD bersumber dari DAK yaitu Penyediaan Generator Set dengan pagu anggaran Rp. 1.300.000.000,- terealisasi Rp. 1.164.952.250 dengan pencapaian keuangan 89,61% dan fisik 100%.

2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Ketersediaan dana APBD bersumber dari dana DID dan DAU yaitu dengan pagu anggaran Rp. 1.008.043.974,- terealisasi Rp. 671.444.414 dengan pencapaian keuangan 66,61% dan fisik 100%. dalam sub kegiatan ini terdiri dari pembayaran insentif dokter spesialis selama 8 bulan, pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 selama 2 (dua) bulan dan pembayaran insentif non tenaga kesehatan yang menangani covid-19 dari bulan Februari-Oktober 2021. pencapaian keuangan masih dibawah 80% disebabkan oleh target untuk Tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 adalah 4 bulan akan tetapi hanya bisa terealisasi selama 2 (dua) bulan (September-Oktober) dikarenakan November dan Desember RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tidak memiliki pasien Covid-19. begitu juga untuk insetif non nakes yang menangani Covid-19 hanya bisa dibayarkan sampai bulan oktober dikarenakan hal yang sama tidak adanya pasien Covid-19 yang ditangani di bulan november dan desember.

3. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 3.22
Penghargaan yang Diraih Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2021	Komisi Informasi Sumatera Barat	RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Hotel Novotel Bukittinggi / 06 Desember 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang mendapatkan penghargaan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2021 dari Komisi Informasi Sumatera Barat (Lembaga Independen) tanggal 06 Desember 2021 di Hotel Novotel Bukittinggi.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

a) Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Dana APBD Berdasarkan Keluaran dan Hasil :

I. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Capaian Target	Persentase Capaian Target Kinerja	
			Realisasi	(%)	
Capaian Program	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%		0%
Input	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.355.543.017	Rp. 20.594.198.999	98,07%	
Output	Jumlah pegawai/ASN/P3K yang menerima gaji dan tunjangan	264 orang	249 orang		94,31%
Outcome	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai/ASN/P3K	100%	100%		100%

II. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan : Pelayanan BLUD RS.Jiwa Saanin Padang

Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Capaian Target		Persentase Capaian Target Kinerja
			Realisasi	(%)	
Capaian Program	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD	48%	100%		100%
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 23.227.155.367	Rp. 20.594.198.999	88,66%	
Output	Jumlah Bulan Pelayanan	12 bulan	12 bulan		100%
Outcame	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	100%		100%

- III. Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Capaian Target		Persentase Capaian Target Kinerja
			Realisasi	(%)	
Capaian Program	Persentase pencapaian standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	100%	100%		100%
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 2.425.361.000	Rp. 2.240.973.315	92,39%	
Output	Jumlah fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang tersedia	145 unit	144 unit		99%
Outcome	Terlaksananya Pengadaan fasilitas, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi tahun 2021	100%	100%		100%

IV. Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Capaian Target		Persentase Capaian Target Kinerja
			Realisasi	(%)	
Capaian Program	Persentase pencapaian standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	100%	100%		100%
Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 1.008.043.974	Rp. 671.444.414	66,61%	
Output	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan	8 Bulan	8 bulan		100%
Outcame	Terlaksananya Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%		100%

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan :

Sebagaimana uraian diatas dapat disimpulkan secara umum gambaran mengenai capaian kinerja pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sesuai dengan Renstra, Program, Visi & Misi Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Saanin Padang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka secara keseluruhan dari indikator kinerja utama menunjukkan capaian kinerja berhasil, sesuai dengan program dan sasaran organisasi. Walaupun ada beberapa target capaian yang belum tercapai. Namun demikian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terlihat adanya peningkatan kinerja yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini terlaksananya fungsi rumah sakit yang selalu memberikan pelayanan dan kepuasan yang terbaik kepada setiap lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Rumah Sakit Jiwa memberikan pelayanan baik itu pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan umum, Napza dan juga memberikan pelayanan penunjang, Mengembangkan pelayanan RS Non Kejiwaan (Penyakit Dalam, Anak, Syaraf, dan Rehab Medik) dan RS.Jiwa juga merupakan RS Rujukan Covid-19. Rumah sakit jiwa menyediakan pelayanan diatas untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan. Sehingga Pelayanan Medis dan Program kegiatan rumah sakit berjalan dengan baik.

B. Hambatan

1. Masih adanya kendala dalam klaim BPJS sehingga pendapatan RS tertunda.
2. Berdasarkan Surat Edaran dari BPJS Kesehatan bulan Juli tahun 2018 tentang Rujukan Online mengakibatkan jumlah pasien

rawat jalan dan rawat inap menurun sehingga berimbas pada penurunan pendapatan RS.

3. Terjadinya penurunan Tipe kelas Rumah Sakit dari A ke B pada tahun 2019 yang berpengaruh pada tarif pelayanan sehingga pendapatan Rumah Sakit juga berkurang sebesar 60% dari kelas A.
4. Predikat hasil penilaian akreditasi RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang versi SNARS Edisi 1 berada pada tingkat Dasar, ini menurun dimana sebelumnya RS.Jiwa Prof.HB.Saanin padang berada di tingkat Paripurna.
5. Terjadinya pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.

C. Solusi yang dilakukan Rumah Sakit Jiwa adalah :

1. Melakukan pendekatan pada BPJS Kesehatan untuk membuka rujukan online ke RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang.
2. Melakukan pendekatan pada BPJS Kesehatan untuk segera dilakukan pembayaran tagihan pasien secepatnya.
3. Mengajukan kredensialing pelayanan non jiwa yang terdiri dari pelayanan Penyakit Dalam, Syaraf, Penyakit Anak dan Rehabilitasi Mental ke BPJS Kesehatan. sebagaimana sudah diatur dalam PMK No 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP No. 47 Tahun 2021, dimana RS Khusus dapat melakukan pelayanan 40% dari TT untuk layanan diluar kekhususannya dan RS sudah melakukan addendum MOU dengan BPJS Kesehatan.
4. Mengupayakan pengembalian Kelas RS menjadi RS khusus Kelas A, antara lain :
 - RS saat ini sudah mendapatkan rekomendasi naik kelas dari Kementerian Kesehatan
 - Proses pengurusan izin operasional menunggu pencabutan SE Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/menkes/455/2020

tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19.

5. Mengembangkan pelayanan RS Non Jiwa (Penyakit Dalam, Anak, Syaraf, dan Rehab Medik).
6. Melakukan efisiensi di belanja BLUD dengan memprioritaskan proses belanja.
7. Meningkatkan koordinasi dengan BPJS untuk pencairan klaim Covid-19 tahun 2020 dan klaim Covid-19 tahun 2021.
8. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk proses pembayaran klaim Covid-19 yang status sudah sesuai dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang.
9. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait pembayaran Piutang Pasien Dinsos.
10. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait rujukan pasien jiwa.